



# **RENCANA KERJA BAPENDA KAB. BONE TAHUN 2022**



**JENIS  
LAYANAN**

DATA BARU

BALIK NAMA

PEMECAHAN

PENGAGUNGAN

PERMUTUHAN

PENGURANGAN

PENGHAPUSAN

**PELAYANAN**

PAJAK BUMI & BANGUNAN  
PEDESAAN PERKOTAAN

**STOP  
PUNGLI**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 beserta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Dengan adanya tuntutan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka harus dilakukan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RKPD Kab. Bone dan Renstra Badan pendapatan Daerah Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 beserta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2022 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2022 guna mendorong pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.

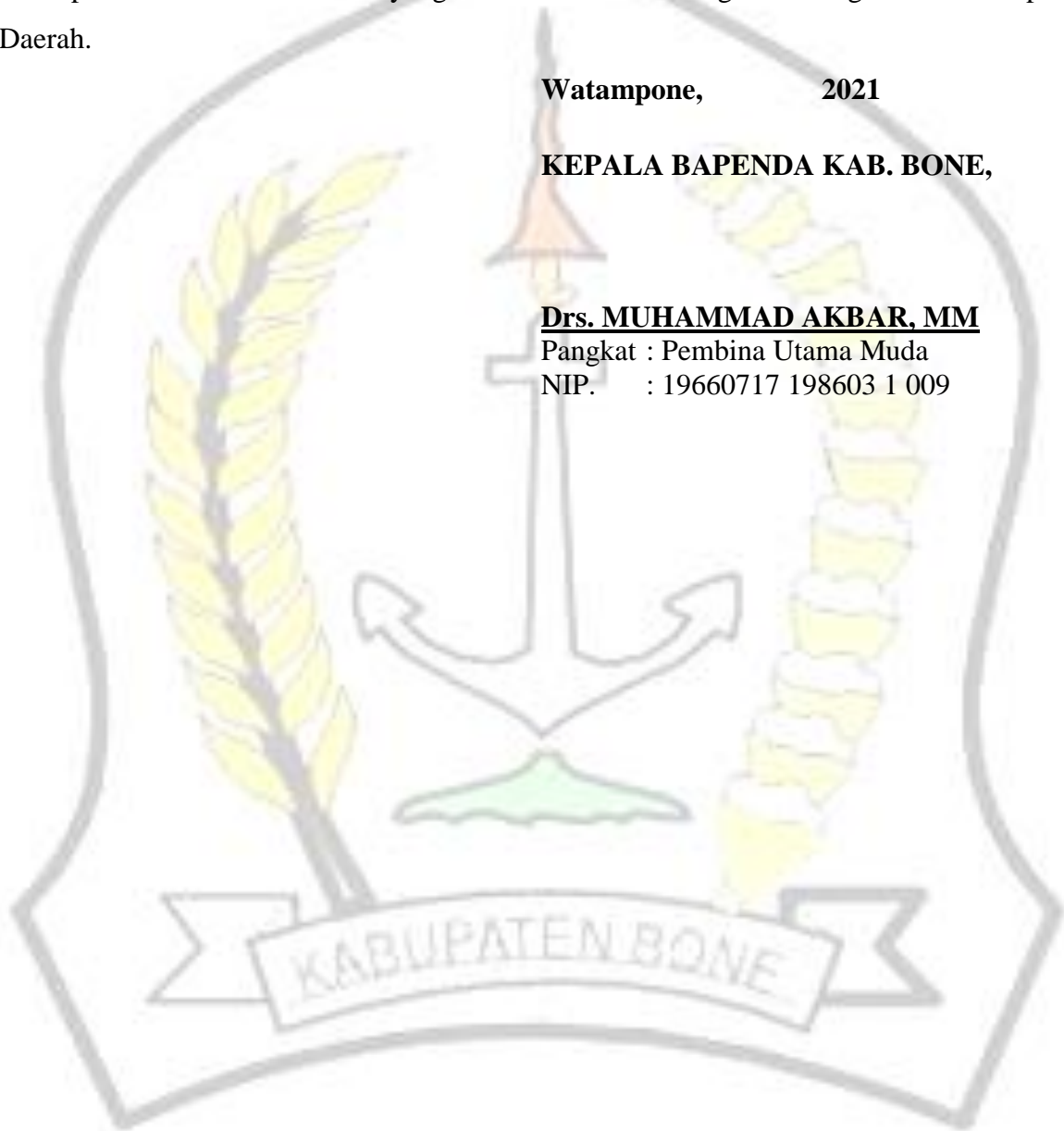
**Watampone, 2021**

**KEPALA BAPENDA KAB. BONE,**

**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19660717 198603 1 009



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>39</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	39
3.3 Program dan Kegiatan	45
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>48</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>49</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Peningkatan Jumlah Objek Pajak	16
Tabel 2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja & Pencapaian Renstra Bapenda Kab.Bone s/d Tahun 2020	17
Tabel 3.	Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 - Tahun 2020	26
Tabel 4.	Target Dan Realisasi PAD Yang Dikelola Bapenda Tahun 2019 Tahun 2020	27
Tabel 5.	IKU Badan Pendapatan Daerah Kab.Bone	28
Tabel 6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapenda Kab.Bone Hingga Tahun 2021 ( Triwulan II ) Dan Proyeksi Tahun 2020 Dan Tahun 2021	29
Tabel 7.	Review Terhadap Rancangan Awal BKPD Kab.Bone Tahun 2022 Bapenda Kab.Bone	33
Tabel 8.	Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Bapenda Kab.Bone	38
Tabel 9.	Tujuan dan Saran Perangkat Daerah Beserta Program Tahun 2021 Bapenda Kab.Bone	44

## DAFTAR TABEL

Gambar 1.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD )	3
Gambar 2.	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	11
Gambar 3.	Pemutakhiran Data PBB-P2	12
Gambar 4.	Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14
Gambar 5.	Kegiatan Pengawasan Retribusi Pasar	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis dalam pembangunan daerah. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Penyusunan Rencana kerja Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah Tahun 2022, rencana pendanaan dan sumber pendanaan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 Jo Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 salah satu fungsi dan tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pemungutan Pendapatan Daerah, disamping melaksanakan pemungutan atas beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bone memiliki target untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mendukung hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 untuk dijadikan acuan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas baik dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah maupun dalam mengelola langsung beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah, agar dapat diperoleh hasil secara optimal sebagai kelanjutan dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan dan berhasil dicapai pada tahun – tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

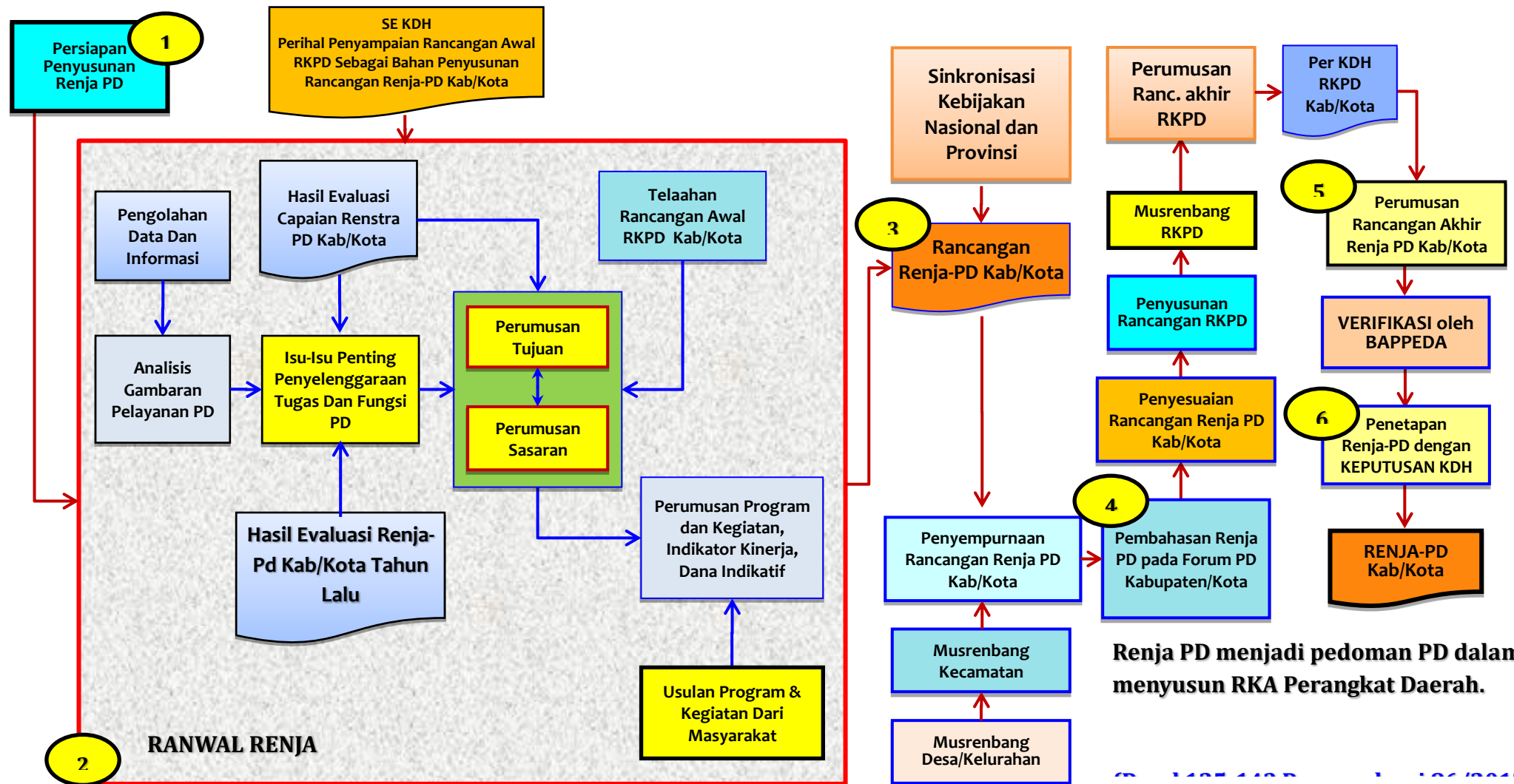
Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)





## I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 41 Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
26. Peraturan Bupati Bone nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah :

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah Kab. Bone. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2022 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan pendapatan daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada Tahun 2022.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2022 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan ;** Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ;** Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya

dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ;** Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ;** Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 5 Penutup ;** Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.





## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis ( Renstra )

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Program / Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 menggambarkan tentang perkembangan capaian Program / Kegiatan yang berkaitan di setiap bidang terkait, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dan Sekretariat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 222 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019, Untuk menunjang tugas pokok, Program dan kegiatannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mendapat alokasi Dana yang telah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 14,695,816,670 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) untuk Belanja Langsung Rp. 6,758,809,000 (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah) untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7,937,007,670,- ( Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribus Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) keseluruhan Belanja Langsung dialokasikan secara efisien dalam pelaksanaan 8 Program yang terdiri dari 30 Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 984,869,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 958,986,416,- atau 97,37 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.**

Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian yaitu penyediaan dana pembayaran telepon.
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan capaian terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan kegiatan.
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian penyediaan peralatan kelistrikan dan alatkebersihan.



- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan capaian peningkatan wawasan aparatur untuk wacana dan informasi aktual, terdiri dari 41 Judul Surat Kabar/Majalah.
- 5) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan capaian terlaksananya konsultasi dan koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan capaian kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 634,625,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 627,830,816- atau 98,93 % dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yaitu Pengadaan alat-alat Angkutan darat bermotor sepeda motor (All New Scoopy Sporty) sebanyak 7 unit dengan capaian lancarnya operasional kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor, yaitu Pengadaan Filling Kabinet sebanyak 1 Unit, AC 2PK sebanyak 2 Unit, AC 1/2 PK sebanyak 1 Unit, Almari sebanyak 2 Unit dan AC 1PK Panasonic sebanyak 2 Unit
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, yaitu Pengadaan Komputer PC sebanyak 2 Unit, Komputer Note Book sebanyak 2 Unit, Printer sebanyak 1 Unit, Mesin Absensi sebanyak 1 Unit, dan Komputer Note Book sebanyak 6 Unit.
- 4) Pengadaan mebeuler, antara Pengadaan Kursi Kerja sebanyak 3 Unit, Meja Kerja sebanyak 3 Unit, Kursi Kerja sebanyak 1 Unit dan Kursi Rapat sebanyak 20 Unit.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, yaitu perbaikan ruang bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dengan capaian meningkatnya kenyamanan fasilitas gedung kantor.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, yaitu belanja jasa service kendaraan roda empat, belanja penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan dua, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan belanja surat tanda nomor kendaraan, dengan capaian terpeliharanya kendaraan dinas pegawai untuk kelancaran operasional.
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, yaitu pemeliharaan AC, Komputer & Note Book, dengan capaian terpeliharanya perlengkapan kantor.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan alokasi dana Rp. 85,450,000,- terealisasi Rp. 84,326,431,-Adapun target aparatur yang mengikuti kursus singkat / pelatihan dan bimtek telah terlampaui dengan diikuti peserta 14 orang aparat. Adapun kursus singkat / pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti adalah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan Petugas Keamanan sebanyak 6 Orang
  - b. Coaching Clinic Penyusunan ASB sebanyak 2 Orang
  - c. Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP sebanyak 3 Orang
  - d. Diklat Peningkatan keahlian dalam Analisa laporan keuangan OPD sebanyak 2 Orang
  - e. Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023 sebanyak 1 Orang
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Disiplin Aparatur,dengan kegiatan sebagai berikut :**
  - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan alokasi anggaran sebesarRp. 52,500,000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 52,500,000 atau 100% dengan target 150 pasang dan tercapai sebanyak 150 pasang.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,821,000 realisasi anggaran sebesar Rp. 9,821,000 atau 100% atau realisasi fisik sebesar 100 %, dengan kegiatan :**
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, yaitu tersedianya 3 Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Renja..
- 6. Program Penunjang Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.860.000,- atau sebesar 96,98 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan kegiatan :**
  - Kegiatan penyusunan rencana perangkat daerah terdiri dari dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun sebanyak 4 dokumen yaitu Renstra, Renja, RKA dan DPA.
- 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.839.504.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.797.281.533,- atau 99,13 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%, program ini didukung dengan kegiatan :**
  1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah, dengan capaian terealisasinya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 250,562,915,028,00 yang dapat dicapai sebesar Rp.271,455,492,653.41 atau 108,34 % dari penerimaan 10 jenis pajak daerah, 20 jenis retribusi daerah, 2 jenis penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 11 jenis penerimaan lain – lain PAD yang sah.

2. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan terciptanya administrasi pengelolaan PBB dengan target jumlah masyarakat yang terlayani dalam pengajuan permohonan pemecahan, penggabungan, pengurangan, data baru, balik nama, pembetulan dan pembatalan. Adapun berkas yang masuk selama Tahun 2020 sebanyak 1404 berkas perubahan .Jumlah Objek pajak yang terdapat pada SISMIOP sebanyak 610.827 dengan pokok sebanyak Rp. 18.040.445.929 Penginputan STTS yang terbayar juga dilaksanakan pada aplikasi SISMIOP dengan jumlah STTS sebanyak 607.674 atau realisasi pembayaran sebesar Rp 17.966.141.500

*Gambar 2*

*Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan*



3. Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya dengan capaian terealisasinya target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 50,763,580,491,- yang dapat dicapai sebesar Rp. 54,776,702,856,- atau 107,91 Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya dengan capaian terealisasinya target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp.49,618,601,766,- yang dapat dicapai sebesar Rp. 54,735,355,216,- atau 110,31 % dan Retribusi Daerah dengan target Rp. 21,514,984,000,- dan terealisasi Rp. 22,181,941,946 atau 103,10 %
4. Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dengan capaian terlaksananya pemutakhiran Data PBB-P2 untuk meningkatkan keakuratan Data PBB-P2 pada Data SISMIOP yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan penerimaan PAD sector Pajak PBB-P2 dimana target PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp. 17.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.967.926.476,- atau sebesar 105,69 %. Untuk kegiatan Sismiop



dilaksanakan di 5 desa yaitu pada Desa Pada Idi, Pongka Kec. Tellu Siattinge, Desa Labotto Kec. Cenrana, Desa Mico Kec. Palakka dan Desa Padangloang Kec. Cina.

*Gambar 3*

*Pemutakhiran Data PBB-P2*



5. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian terlaksananya pendataan wajib pajak. Jumlah Obyek Pajak yang telah didata pada Tahun 2020 Pajak Reklame 397 Objek Pajak, Pajak Hiburan 5 Objek Pajak, Pajak Sarang Burung Walet 48 Objek Pajak, Pajak Hotel 46 Objek Pajak, Pajak Restoran 622 Objek Pajak, dan Retribusi Sewa Rumah Daerah Sebesar 56 Objek Pajak.
6. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian proses pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan optimal sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan penagihan. Pelaksanaan Validasi dilaksanakan secara akurat untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan jumlah surat ketetapan yang ditetapkan Pajak Reklame 397 Objek Pajak, Pajak Hiburan 5 Objek Pajak, Pajak Sarang Burung Walet 48 Objek Pajak, Sewa Rumah Daerah 56 Objek Pajak, Pajak Air Tanah sebanyak 37 Objek Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan kurang bayar bagi data BPHTB yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan. data BPHTB yang telah diverifikasi pada Tahun 2020 sebanyak 3,479 Objek Pajak.
7. Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan capaian terealisasinya pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 18,040,445,929,- dari target Rp. 17,966,141,500,- Dengan capaian penyediaan biaya jasa administrasi pemungutan bagi Kepala Desa dan Kolektor selaku pelaksana Penagihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terdapat 610.827 lembar SPPT PBB yang akan ditagih kepada wajib pajak.
8. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian semakin efektifnya pengelolaan administrasi penerimaan PBB-P2 dengan membuat dokumen pendukung seperti :

- 
- a. Dokumen Penerimaan DHKP PBB
  - b. Laporan Perubahan PBB-P2 perdesa dan kelurahan
  - c. Laporan Bulanan PBB-P2 perdesa dan kelurahan
  - d. Laporan Bulanan PBB-P2 perkecamatan
  - e. Laporan Triwulan PBB-P2
  - f. Laporan Peringkat Desa dengan pelunasan tercepat
  - g. Laporan Peringkat Kecamatan dengan pelunasan tercepat
  - h. Laporan Realisasi Tunggal Tahunan
  - i. Rekapitulasi Laporan Penerimaan PBB
9. Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya dengan capaian semakin efisiennya Penatausahaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah .Dengan membuat dokumen pendukung seperti :
- a. Laporan Penerimaan SKPD dan SKRD
  - b. Laporan Penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah Yang Di kelola Bapenda
  - c. Laporan Penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah Yang Di kelola OPD pengelola PAD
  - d. Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Lainnya
  - e. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah Perbulan, pertriwulan dan tahunan.
10. Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga dengan capaian semakin efektifnya Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga yang akurat dan tepat waktu. Adapun dokumen yang dibuat adalah sebagai berikut :
- a. Laporan Persediaan Benda Berharga per OPD
  - b. Laporan Penerimaan uang hasil pemungutan benda berharga per OPD
  - c. Laporan pembukuan persediaan benda berharga per wilayah
  - d. Laporan Penerimaan Uang Hasil Pungutan Benda Berharga per wilayah
  - e. Laporan data pengambilan barang berharga per wilayah
  - f. Laporan Persediaan Benda Berharga Bapenda
  - g. Laporan surat permintaan barang cetakan Bapenda
  - h. Laporan Data realisasipajak/retribusi yang dikelola Koordinator Wilayah Pasar
  - i. Laporan Realisasi Penerimaan PAD yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah
  - j. Laporan target rekapitulasi penerima pendapatan daerah Kabupaten Bone



k. Laporan Realisasi Penerimaan PAD Khusus yang dikelola Bapenda Kabupaten Bone

11. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian data yang terdapat pada aplikasi SISMIOP akurat. Pencetakan SPPT, STTS dan DHKP dilaksanakan dengan optimal, jumlah SPPT diterbitkan sebanyak 604.000 Lembar dan proses pendistribusian meliputi 44 kelurahan dan 328 Desa

Gambar 4

Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



3. Kegiatan Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584,951,000,- dan terealisasi sebanyak 579,504,000,- atau sebesar 99,07%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor retribusi pasar. Adapun yang menjadi target Pengawasan Penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2020 adalah sebanyak 83 pasar. Berikut dokumentasi Kegiatan Pengawasan Retribusi Pasar

Gambar 5  
Kegiatan Pengawasan Retribusi Pasar



- 8. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan alokasi anggaran Rp.94.440.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 94.234,75,- atau 99,78 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Dengan capaian Persentase kenaikan obyek pajak daerah setiap tahun. Program ini didukung dengan kegiatan :**

Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan agenda sebagai berikut:

- a. Sosialisasi melalui media massa/media cetak  
Dilaksanakan dengan memasang iklan himbauan pembayaran pajak dan retribusi pada Koran/media cetak
- b. Sosialisasi Kepada masyarakat dan para pejabat ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan langsung kepada masyarakat baik di rumah maupun tempat usaha. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan menyebarkan leaflet Pajak Daerah serta memberikan pemahaman kepada pejabat/aparat di desa dan kelurahan serta Kecamatan.

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menambah Obyek pajak sehingga dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Adapun kenaikan obyek Pajak Daerah pada Tahun 2020 yang ditargetkan dalam Renstra 2018-2023 sebanyak 609.645 Obyek Pajak atau 0,18 %, namun realisasi peningkatan Obyek Pajak daerah pada Tahun 2020 sebanyak 614.758 terdapat peningkatan sebanyak 5.113 Obyek Pajak atau 0,29 % dari jumlah Obyek pajak pada Tahun 2019 sebanyak 612.977 atau 0,16 %. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam pendaftaran sebagai wajib pajak karena adanya sosialisasi yang telah diberikan kepada masyarakat dan aparat kecamatan, desa dan kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 1*  
*Peningkatan Jumlah Obyek Pajak*

No	JenisPajak	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Pajak Hotel	44 OP	46 OP
2.	Pajak Restoran	622 OP	622 OP
3.	Pajak Hiburan	7 OP	5 OP
4.	Pajak Reklame	368 OP	397 OP
5.	Pajak Air Tanah	37 OP	37 OP
6.	Pajak Minerba	586 OP	434 OP
7.	Pajak sarang Burung wallet	39 OP	48 OP
8.	BPHTB	1.584 OP	3.479 OP
9.	PBB-P2	609.690 OP	609.690 OP
<b>JUMLAH</b>		<b>612.977</b>	<b>614.758</b>

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 Triwulan IV sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 :

Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
							Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2020 Triwulan IV	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5/6)	(8)	9=(5+8)	10= (9/4)
1				Urusan Wajib								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen )	100	100	100	100	100	100	100
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon & Listrik (Rekening)	12	12	12	100	12	24	50
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Pendukung Yang Mendapatkan Pembayaran Jasa Adm. Dan Asuransi (Orang)	672	672	672	100	672	1344	50
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	12	12	12	100	12	24	50
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Yang Menyediakan Bahan Bacaan ( Media)	36	36	36	100	36	72	50
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti (Kegiatan)	132	130	130	100	132	262	50.38
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket )	12	12	12	100	12	24	50



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
							Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2020 Triwulan IV	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5/6)	(8)	9=(5+8)	10= (9/4)
1	20	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran (Persen )	100	100	100	100	100		
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Unit) • Motor	1	• 1	• 1	100%	7	7	700
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	5	4 Jenis • Gerobak Sampah • Almari Arsip • Filling Kabinet • Gorden	4 Jenis • Gerobak Sampah • Almari Arsip • Filling Kabinet • Gorden LED	100%	3	7	71,42
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis)	5	5 Jenis • Sound system • Komputer PC • Printer • Hardisk	4 Jenis • Sound system • Komputer PC • Printer • Hardisk	80%	5	10	50



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
							Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2020 Triwulan IV	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5/6)	(8)	9=(5+8)	10= (9/4)
1	20	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor (Jenis)	6	6 Jenis • Meja Kerja • Meja Komputer • Kursi Kerja • Meja rapat • Kursi rapat • Meja kerja	2 jenis • Meja Kerja • Kursi rapat	33.33%	6	8	75
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara (Unit)	1	1	1	100%	1	1	100
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama setahun anggaran (Unit)	35	35	35	100%	35	105	33.33
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (jenis)	8	8	8	100%	8	16	50
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	300	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
							Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2020 Triwulan IV	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5/6)	(8)	9=(5+8)	10= (9/4)
1	20	03	06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN (Pasang)	150	150	150	100%	150	300	50
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan (Persen)		100	100	100	2	27	7.40
1	20	05	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal (Orang)	2	25	25	100	2	27	7.40
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap Tahun Anggaran (Persen)	100	100	100	100	100	6	50
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersusun (Dokumen)	3	3	3	100	3	6	50
1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran (Persen )	100	100	100	100	100	100	50%
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang tersusun (dokumen)	3	3	3	100	3	6	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
							Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2020 Triwulan IV	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5/6)	(8)	9=(5+8)	10= (9/4)
1	20	08	03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran dan Promosi Yang diikuti (Kegiatan)	1				1	-	-
1	20	17		Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target (Persen)	100	100	100	100	100	100	
1	20	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (Pengawasan, Perluasan & Penggalian)	3	3	3	100	3	6	50
1	20	17	70	Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	Jumlah Pelayanan PBB-P2 Yang Diberikan kepada wajib pajak (Layanan)	6	6	6	100	6	12	50
1	20	17	71	Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah & Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya (Jenis)	8	8	8	100	8	16	50
1	20	17	72	Pemutakhiran Data Objek PBB-P2	Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Data PBB-P2 (Paket)	2	2	2	100	2	4	50
1	20	17	73	Pendaftaran & Pendataan Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Daerah & Retribusi Daerah Yang	750	750	750	100	750	940	125

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
							Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2020 Triwulan IV	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5/6)	(8)	9=(5+8)	10= (9/4)
					dikelola pendataanya secara berkala (WP & WR)							
1	20	17	74	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penerbitan dan distribusi ketetapan pajak daerah & retribusi daerah (Dokumen)	5	5	5	100	5	10	50
1	20	17	75	Operasional Penagihan PBB-P2	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB-P2 (Orang)	504	504	504	100	504	1008	50
1	20	17	76	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan PBB-P2	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2 (Dokumen)	4	4	4	100	4	8	50
1	20	17	77	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah (Dokumen)	6	6	6	100	6	12	50

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
							Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Th. 2020 Triwulan IV	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5/6)	(8)	9=(5+8)	10= (9/4)
1	20	17	78	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Jumlah dokumen laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga (Dokumen)	10	10	10	100	10	20	50
1	20	17	80	Penerbitan & Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2	Jumlah Dokumen Penerbitan & Distribusi SPPT, STTS dan DHKP (Dokumen)	3	3	3	100	3	6	50
1	20	17	84	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Pasar Yang Dioptimalkan Pemungutan Retribusinya (Pasar)	83	83	83	100	83	166	50
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah Setiap Tahun	100	100	100	100	100	-	-
1	20	26	08	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Orang)	150	100	100	100	150	300	50



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah baik mengkoordinir seluruh kegiatan Penerimaan Daerah maupun dalam mengelola langsung beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, mendapat dukungan pembiayaan yang secara jelas tercantum dalam APBD Kabupaten Bone.

Tinjauan Evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Kab. Bone Tahun 2020 dilakukan dengan menghitung persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Daerah dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD Kab. Bone Tahun 2020. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selaku koordinator Penerimaan Pendapatan Daerah mengkoordinir Penerimaan PAD yang dikelola oleh 17 ( Tujuh Belas ) OPD.

Dari 30 (tiga puluh) Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020, terdapat 13 (tiga belas) jenis yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari :

**a. Sektor Pajak Daerah mengelola sepuluh jenis yaitu:**

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan

**b. Sektor Retribusi Daerah mengelola Tiga jenis yaitu:**

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - Pemakaian Rumah Daerah;
  - Pemakaian BTC.
2. Retribusi Pasar Grosir
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung Pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.49,618,601,766,- dan berhasil direalisasikan sampai akhir Tahun Anggaran sebesar Rp. 54,735,355,216,-atau 110,31 %.

Peningkatan Realisasi Penerimaan ini disebabkan adanya peningkatan dan penurunan penerimaan dari 4 jenis Penerimaan PAD yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat penurunan Penerimaan Pajak Daerah sebesar (0,08) % yaitu dari Rp.54,776,702,856 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 54,735,355,216 pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya Dampak Pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya omzet penjualan pada obyek Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Serta adanya pemberian insentif perpajakan dari Pemerintah Kabupaten Bone berupa pembebasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah selama 2 bulan.
2. Terdapat peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 15,08 % yaitu pada Tahun 2019 Realisasi Rp. 19,274,791,794 menjadi Rp. 22,181,941,946 pada Tahun 2020 . Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum khususnya pada penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.
3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2.088.533.758 atau 24,40 % dari penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank SulSelBar
4. Lain-lain PAD yang Sah terdapat peningkatan sebesar Rp. 36.038.854.000 atau 24,37 % dari semula pada Tahun 2019 dicapai sebesar Rp. 147.852.179.586 menjadi Rp.183.891.033.586,41 pada Tahun 2020 khususnya pada penerimaan Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Dengan demikian, Penerimaan yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam Tahun 2020 memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD sebesar 20,16 % atas realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Adapun capaian Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Bone dilihat pada Tabel 2.2 dan capaian Realisasi PAD khusus yang dikelola Bapenda Kab. Bone dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

**TABEL 3**  
**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019 - TAHUN 2020**

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%	TAHUN 2020		%	PENINGKATAN REALISASI	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		NILAI (Rp)	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>208,169,739,391.00</b>	<b>230,462,296,384.48</b>	110.71	<b>250,562,915,028.00</b>	<b>271,455,492,653.00</b>	108.34	<b>40,993,196,268.52</b>	<b>17.79</b>
	- PAJAK DAERAH	50,763,580,491.00	54,776,702,856.66	107.91	49,618,601,766.00	54,735,355,216.00	110.31	- 41,347,640.66	- 0.08
	- RETRIBUSI DAERAH	22,214,333,000.00	19,274,785,794.00	86.77	21,514,984,000.00	22,181,941,946.00	103.10	2,907,156,152.00	15.08
	YANG DIPISAHKAN	8,558,628,147.00	8,558,628,147.00	100.00	10,683,630,905.00	10,647,161,905.00	99.66	2,088,533,758.00	24.40
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	126,633,197,753.00	147,852,179,586.82	116.76	168,745,698,357.00	183,891,033,586.00	108.98	36,038,853,999.18	24.37
	YANG SAH								
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,634,922,733,000.00</b>	<b>1,603,392,651,884.00</b>	98.07	<b>1,472,798,260,499.00</b>	<b>1,445,278,185,340</b>	98.13	<b>- 158,114,466,544.00</b>	<b>- 9.86</b>
	- DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL	24,287,140,000.00	17,179,515,954.00	70.74	23,699,558,000.00	23,467,088,444.00	99.02	6,287,572,490.00	36.60
	BUKAN PAJAK								
	- DANA ALOKASI UMUM	1,116,830,949,000.00	1,116,830,949,000.00	100.00	1,015,212,018,000.00	1,000,527,318,000.00	98.55	- 116,303,631,000.00	- 10.41
	- DANA ALOKASI KHUSUS	493,804,644,000.00	469,382,186,930.00	95.05	433,886,684,499.00	421,283,778,896.00	97.10	- 48,098,408,034.00	- 10.25
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>	<b>598,743,296,400.00</b>	<b>609,543,623,432.22</b>	101.80	<b>695,153,857,817.00</b>	<b>813,852,288,182.00</b>	117.08	<b>204,302,864,749.78</b>	<b>33.52</b>
	- HIBAH	101,397,018,400.00	106,730,801,724.00	105.26	100,809,486,000.00	111,197,545,150.00	110.30	4,466,743,426.00	4.19
	- BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN	78,083,000,000.00	84,886,090,708.22	108.71	78,429,535,172.00	81,975,704,795.00	104.52	2,910,385,913.22	3.43
	DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA								
	- DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	9,486,726,000.00	9,486,726,000.00	100.00	375,498,413,000.00	375,498,413,000.00	100.00	366,011,687,000.00	3,858.15
	- BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	72,444,000,000.00	71,113,253,000.00	98.16	82,670,000,000.00	81,685,861,443.00	98.81	10,572,608,443.00	14.87
	PEMERINTAH DAERAH LAINNYA								
	- PENDAPATAN LAINNYA	337,332,552,000.00	337,332,552,000.00		57,746,423,645.00	163,494,763,794.00	283.13	- 173,837,788,206.00	- 51.53
	- PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,441,835,768,791.00</b>	<b>2,443,398,571,700.70</b>	<b>100.06</b>	<b>2,418,515,033,344.00</b>	<b>2,530,585,966,175.00</b>	<b>104.63</b>	<b>87,181,594,474.30</b>	<b>3.57</b>

**TABEL 4**  
**TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA BAPENDA TAHUN 2019 - TAHUN 2020**

NO	URAIAN	TAHUN 2019		%	TAHUN 2020		%	PENINGKATAN REALISASI	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		NILAI (Rp)	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PAJAK HOTEL	635,339,806.00	593,324,137.00	93.39	431,949,839.00	384,577,083.00	89.03	- 208,747,054.00	- 35.18
2	PAJAK RESTORAN	3,439,009,301.00	4,250,707,358.00	123.60	2,789,009,320.00	4,135,504,321.00	148.28	- 115,203,037.00	- 2.71
3	PAJAK HIBURAN	193,000,000.00	125,806,795.00	65.18	52,450,000.00	22,012,520.00	41.97	- 103,794,275.00	- 82.50
4	PAJAK REKLAME	764,216,925.00	983,542,000.00	128.70	1,064,216,925.00	1,218,859,500.00	114.53	235,317,500.00	23.93
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	22,205,315,479.00	22,812,794,393.00	102.74	22,109,975,682.00	22,917,608,527.00	103.65	104,814,134.00	0.46
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	400,000,000.00	432,741,005.00	108.19	200,000,000.00	212,240,150.00	106.12	- 220,500,855.00	- 50.95
7	PAJAK AIR TANAH	104,198,980.00	83,854,278.00	80.48	36,000,000.00	14,437,414.00	40.10	- 69,416,864.00	- 82.78
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	22,500,000.00	34,450,000.00	153.11	35,000,000.00	35,600,000.00	101.71	1,150,000.00	3.34
9	PAJAK PARKIR		17,584,830.00		50,000,000.00	6,275,700.00	12.55	- 11,309,130.00	- 64.31
10	PAJAK BUMI & BANGUNAN PERDESAAN & PERKOTAAN	16,500,000,000.00	17,416,821,250.00	105.56	17,000,000,000.00	17,967,926,476.00	105.69	551,105,226.00	3.16
11	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	6,500,000,000.00	8,023,876,810.00	123.44	5,850,000,000.00	7,820,313,525.00	133.68	- 203,563,285.00	- 2.54
12	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	2,416,818,000.00	2,230,259,000.00	92.28	1,560,160,000.00	1,727,022,500.00	110.70	- 503,236,500.00	- 22.56
13	RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN	71,798,400.00	88,080,000.00	122.68	64,000,000.00	77,616,000.00	121.28	- 10,464,000.00	- 11.88
14	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	171,113,000.00	93,700,000.00	54.76	289,475,000.00	77,650,000.00	26.82	- 16,050,000.00	- 17.13
15	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	40,000,000.00	24,300,000.00	60.75	35,514,000.00	39,463,000.00	111.12	15,163,000.00	62.40
	<b>JUMLAH</b>	<b>53,463,309,891.00</b>	<b>57,211,841,856.00</b>	<b>107.01</b>	<b>51,567,750,766.00</b>	<b>56,657,106,716.00</b>	<b>109.87</b>	<b>- 554,735,140.00</b>	<b>- 0.97</b>



Badan Pendapatan Daerah Kab.Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk lima tahun hanya mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023, dimana capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dinyatakan dalam 2 sasaran strategis & 2 indikator kerjanya.

Kedua indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 5  
IKU Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN & SUMBER DATA
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	persen	<p><u>Formulasi Perhitungan :</u></p> $\frac{\text{Realisasi PAD Thn ini} - \text{Realisasi PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun lalu}} \times 100$ <p><u>Sumber Data :</u> Laporan Realisasi Pendapatan Daerah</p>
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	persen	<p><u>Formulasi Perhitungan :</u></p> $\frac{\text{Persentase Penggunaan Aplikasi Thn ini} - \text{Persentase penggunaan aplikasi tahun lalu}}{\text{Persentase penggunaan aplikasi tahun lalu}} \times 100$ <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Pengelolaan Sistem Informasi pendapatan daerah</p>

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 (Triwulan II) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2018-2023, disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapenda Kab. Bone hingga Tahun 2021 (Triwulan II) dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021 (tw II)	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah													
1	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	-	-	0,64	5,90	13,5	6,50	6,50	17,79	(55,58)	13,35	6,50	
	<b>Catatan Analisis :</b> Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2020 tercapai sebesar Rp. 271,455,492,653 terdapat peningkatan sebesar Rp. 40,993,190,269 atau 17,79 % dari tahun 2019 hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan adanya penerapan pajak online.  Sedangkan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2021 (Triwulan II) sebesar Rp. 120,578,825,405 hal ini disebabkan karena belum terealisasinya target penerimaan untuk tahun 2021 yang diperkirakan akan mencapai target pada bulan desember.												
Sasaran 2 : Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan													
2	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	-	-	-	-	100	100	100		25%	100	100	
	<b>Catatan Analisis :</b> Karena adanya perubahan IKU pada Perubahan Renstra 2018-2023 maka sasaran ke dua belum terealisasi. Karena untuk pelaksanaan sasaran ke 2 dilaksanakan pada tahun 2021												

## **2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 83 Tahun 2020 yaitu

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah
4. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah
2. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak belum memadai.
3. Instrumen Perpajakan yang digunakan dalam penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan belum memadai/tersedia seperti Pemeriksa Pajak, Juru Sita Pajak, dan Penyidik Perpajakan.

### **Kekuatan :**

1. Aturan tingkat daerah cukup memadai dan jelas pelaksanaannya;
2. Potensi obyek pajak yang belum tergali cukup banyak;

3. Jumlah SDM Bapenda memadai.

**Tantangan :**

1. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. Belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. Inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncontrollable* oleh Bapenda.
4. Luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
5. Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

**Peluang :**

1. potensi obyek pajak yang masih banyak dan belum tergali;
2. Ada kesempatan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur pelayanan pasar dan pelabuhan rakyat sebagai pendukung pungutan retribusi;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2022 yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah ;
- b. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD



Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini:



Tabel 7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				10,167,867,025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				10,167,867,025	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44,876,600,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44,876,600,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	33,229,600,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	33,229,600,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	11,647,000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	11,647,000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,054,541,812	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,054,541,812	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi bagi ASN	12 org/bulan	8,054,541,812	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi bagi ASN	12 org/bulan	8,054,541,812	
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				418,822,710,00					516.182.800,00	
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	1 Dokumen	47,128,330,00	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	1 Dokumen	47,128,330,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang diolah secara berkala	3 dokumen	35,624,360,00	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang diolah secara berkala	3 dokumen	35,624,360,00	
3	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah penetapan wajib retribusi daerah	55 WR	18,071,250,00	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah penetapan wajib retribusi daerah	55 WR	18,071,250,00	
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	10 dokumen	317,998,770,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	10 dokumen	317,998,770,00	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>24,450,000,00</b>					<b>24,450,000,00</b>	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis	10 Orang	24,450,000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis	10 Orang	24,450,000,00	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>302,278,870</b>					<b>302,278,870</b>	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	73,652,730,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	73,652,730,00	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga sesuai rencana kebutuhan	12 paket	11,838,140,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bapenda	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga sesuai rencana kebutuhan	12 paket	11,838,140,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan	12 paket	68,750,000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan	12 paket	68,750,000,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	12 paket	43,278,000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	12 paket	43,278,000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 paket	33,600,000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 paket	33,600,000,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	12 laporan	71,160,000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	12 laporan	71,160,000,00	
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>55,209,500,00</b>					<b>209.006.100,00</b>	
1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bapenda	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	25,000,000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	25,000,000,00	
2	Pengadaan meubel	Bapenda	Jumlah Pengadaan meubeleur	3 jenis	7,497,000,00	Pengadaan meubel	Bapenda	Jumlah Pengadaan meubeleur		7,497,000,00	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	22,712,500,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	22,712,500,00	
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bapenda			<b>971,878,533,00</b>					<b>971,878,533,00</b>	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap tahun	12 Rekening	72.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap tahun	12 Rekening	72.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor setiap bulan	12 paket	899,878,533	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor setiap bulan	12 paket	899,878,533	
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bapenda			<b>294,809,000,00</b>					<b>294,809,000,00</b>	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala	12 paket	157,938,000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala	12 paket	157,938,000,00	
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya	12 paket	19,150,000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapenda	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya	12 paket	19,150,000,00	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	117,721,000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	117,721,000,00	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>3,382,611,187</b>					<b>3,382,611,187</b>	
9	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>				<b>3,382,611,187</b>					<b>3,382,611,187</b>	
13	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 dokumen	72,422,720,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	1 dokumen	72,422,720,00	
14	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumah peserta yang mengikuti penyuluhan	200 orang	59,319,250,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumah peserta yang mengikuti penyuluhan	200 orang	59,319,250,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah laporan Wajib Pajak Daerah Yang dikelola pendataanya secara berkala	610.560 WP & WR	121,016,100,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Wajib Pajak Daerah Yang dikelola pendataanya secara berkala	610.000 WP & WR	121,016,100,00	
16	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4 Dokumen	109,073,680,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4 Dokumen	109,073,680,00	
17	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah jenis pajak yang ditetapkan atas ketetapan pajak daerah	7 jenis	53,572,410,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah jenis pajak yang ditetapkan atas ketetapan pajak daerah	7 jenis	53,572,410,00	
18	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		jumlah Pelayanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak	6 layanan	631,508,467,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		jumlah Pelayanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak	6 layanan	631,508,467,00	
19	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan di verifikasi	4 dokumen	64,278,120,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan di verifikasi	4 dokumen	64,278,120,00	
20	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak pajak daerah yang ditagih	610.660 wajib pajak	1,752,059,240	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah wajib pajak pajak daerah yang ditagih	610.660 wajib pajak	1,752,059,240	
21	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3 kegiatan	70,008,650	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah paket pemutakhiran data objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	3 kegiatan	70,008,650	
22	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	3 kegiatan	29,382,250	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	3 kegiatan	29,382,250	

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta aturan-aturan pelaksanaanya, rencana program dan kegiatan dititik beratkan dari usulan masyarakat baik yang diperoleh pada saat kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrembang maupun yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ikut pada saat kegiatan musrembang, maka diperoleh usulan program dan kegiatan untuk Tahun 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Adapun Usulan program dan kegiatan Hasil Musrembang Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 8**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<div>➤ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</div> <div>❖ Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan &amp; Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)</div>	<div>1. Kel. Lonrae Kec. Tanete Riattang Timur</div> <div>2. Kel. Polewali Kec. Tanete Riattang Barat</div> <div>3. Kelurahan Panyula Kec. Tanete Riattang Timur</div> <div>4. Lingkungan Pallengoreng 1 dan 2 Kelurahan Biru Kec, Tanete Riattang</div> <div>5. Kelurahan Majang Kec. Tanete Riattang Barat</div>	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target	1 paket	Daftar Usulan hasil Musrenbang (aspirasi)

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah Dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dan merupakan koridor dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Telaahan terhadap kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak yang implementasinya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dengan melaksanakan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui program dan kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.

Sebagaimana telah diketahui Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah mencanangkan visi dan misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah Visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 yaitu :

***” Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera ”***

Dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 visi yang ditempuh sebagai berikut :

- Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme ( KKN )
- Misi 2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Misi 3. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- Misi 4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan.
- Misi 5. Mendorong percepatan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- Misi 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.



Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)***

Sesuai misi tersebut di atas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan rumusan sasaran target kinerja rancangan awal Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2022.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

**Tujuan 1** : *Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan daerah.*
- 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*
- 3. Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan .*

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022 lebih lanjut dijabarkan sesuai tugas dan fungsi yang ada serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

**A. BIDANG SEKRETARIAT**

1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program ;
2. Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) ;
3. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah ;
4. Pelaksanaan pembinaan urusan umum dan administrasi kepegawaian ;
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca ;
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah ;

7. Melaksanakan Peningkatan Pengetahuan aparat Bapenda .

**B. BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH**

1. Meninjau dan melakukan Perubahan Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, utamanya Peraturan Daerah yang usianya di atas 3 (tiga) tahun maupun Perubahan Peraturan Daerah yang belum mencapai 3 (tiga) tahun tetapi situasi dan kondisi objek / subjek memungkinkan untuk diadakan perubahan;
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak;
3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baru sebagai usaha Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
4. Melaksanakan Rapat minimal sekali setiap triwulan dengan satuan kerja perangkat daerah untuk mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD;
5. Melaksanakan evaluasi, penyempurnaan sistim, prosedur dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan manual Pendapatan Daerah;
6. Memberikan Penyuluhan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Mengadakan Evaluasi Langsung pada Pelaksana Pemungutan dalam Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan maksud :
  - a. Pemantapan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain – lain Pendapatan Daerah;
  - b. Mengevaluasi keadaan fasilitas penyelenggaraan (Sarana dan Prasarana).
8. Memberikan target operasional Pelaksana Pemungutan dengan maksud mengamankan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;
9. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis bagi para Petugas Pengelola PBB – P2 dan Para Koordinator Pemungut, Pembantu Bendahara Khusus Penerima serta unsur yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah .
10. Melaksanakan Intensifikasi dan Pengendalian atas pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

### **C. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN**

1. Mengadakan pendataan objek / subjek Pajak Hotel, Restoran, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet dan BPHTB serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Tambang C) serta objek PBB – P2;
2. Mengadakan pendataan objek / subjek Golongan Badan Usaha yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Bone;
3. Menindak lanjuti SPPT PBB yang bermasalah seperti Double Penetapan, Pengenaan Pajak yang tidak sesuai dengan NJOP dan Penetapan PBB fiktif dengan jalan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dan melakukan Intensifikasi Penagihan PBB tahun sebelumnya (Tunggakan);
4. Melakukan perubahan data melalui Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
5. Memberikan penghargaan kepada para Camat, Kepala Desa dan Lurah yang berprestasi dalam Pengelolaan PBB;

### **D. BIDANG EVALUASI & PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH**

1. Mencari data sekaligus melaksanakan Penagihan atas Hak Pemerintah Kabupaten Bone dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
2. Akan mengembangkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
3. Melaksanakan penyerahan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada para Camat, Kepala Desa / Lurah;
4. Melaksanakan Penagihan sementara dan penagihan piutang Pajak dan Retribusi Daerah ;
5. Mengadakan uji petik penerimaan Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir;
6. Membentuk Tim Inventarisasi dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
7. Melaksanakan Pemeriksaan rutin pada pelaksana pemungutan dilingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;
8. Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola PAD;
9. Melakukan Bimbingan Tekhnis pada aparat pelaksana Pengelola Pendapatan Daerah;
10. Melakukan Pengendalian / Penelitian Dokumen hasil pengelolaan Pendapatan Daerah yang dipungut oleh Pelaksana Tekhnis dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;

11. Monitoring, pengawasan internal dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
12. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pengawasan Intern / Ekstern dalam rangka pemutakhiran data hasil tindak lanjut ;
13. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lain terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **E. BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN**

1. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta poengelolaan benda berharga ;
2. Pencatatan penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
3. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya secara berkala ;
4. Perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga ;
5. Pembuatan Laporan persediaan benda berharga secara berkala ;
6. Penyajian data dan informasi tentang penerimaan Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2022, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 9***Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program Tahun 2021 – Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN (TAHUN 2021)	PROGRAM
1	Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang badan pendapatan daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP (PREDIKAT	BB	BB	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota
		Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	6.50	6.50	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapata	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100	100	

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kriteria kegiatan adalah Spesifik, terukur, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang harus dilakukan dalam penganggaran APBD T.A. 2022, maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan lama sesuai Renstra/Renja (menurut PMDN 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan baru (sesuai Nomenklatur PMDN 90 Tahun 2019). Proses pemetaan dilakukan sesuai prinsip-prinsip pemetaan yang berlaku tanpa mengubah indikator-indikator dan target kinerja output dan outcome yang sudah ada dalam Renstra dan RPJMD, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

#### ***1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota***

##### ***1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan

**3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2. Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah
3. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah
4. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

**4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
3. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peratutan perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

**6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Sub Kegiatan Pengadaan meubel
3. Sub Kegiatan Pengadaan perlatan dan mesin lainnya

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan**

- a. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah
- b. Sub Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- c. Sub Kegiatan Penetapan wajib pajak daerah
- d. Sub Kegiatan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- e. Sub Kegiatan Penagihan pajak daerah
- f. Sub Kegiatan Penyelesaian keberatan pajak daerah
- g. Sub Kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- h. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah
- i. Sub Kegiatan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- j. Sub Kegiatan Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
- k. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- l. Sub Kegiatan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2022 terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang terbagi atas 1 Program Prioritas dengan 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan serta 1 Program Pendukung dengan 8 Kegiatan dan 12 sub kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada Bab III sebelumnya. Dengan alokasi dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 13.550.478,212,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bone.

Setelah melalui penyesuaian terhadap pagu indikatif yang ditetapkan, termasuk penyesuaian target outcome/output program dan kegiatan, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								13,550,478,212				15,434,830,434	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,167,867,025				11,482,478,472	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								44,876,600				53,575,060	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	6 dokumen	100 persen	33,229,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	40,763,360
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 dokumen	100 persen	11,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	12,811,700
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,054,541,812				8,976,532,600	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi bagi asn	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	58 orang	100 persen	8,054,541,812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	8,976,532,600
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								418,822,710				507,052,106	
5	02	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 dokumen	100 persen	47,128,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	73,566,163
5	02	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang dikelola secara berkala	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 dokumen	100 persen	35,624,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	36,231,921
5	02	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	55 wajib retribusi	100 persen	18,071,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	27,028,375
5	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi darah	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	10 dokumen	100 persen	317,998,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	370,225,647
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								25,450,000				29,267,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Semua Kelurahan	100 Persen	10 orang	100 persen	25,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	29,267,500
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								302,278,870			365,420,066		
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	73,652,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	87,223,312
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	11,838,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	21,469,954
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan bahan logistik	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	68,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	75,625,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	43,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	47,605,800
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	39,600,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	70 kegiatan	100 persen	71,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	93,896,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55,209,500			60,730,450		
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 unit	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	27,500,000



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan mebel	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	3 jenis	100 persen	7,497,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	8,246,700
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	2 jenis	100 persen	22,712,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	24,983,750
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								971,878,533	1,169,777,810				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi informasi (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	72,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	79,200,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	899,878,533	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,090,577,810
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								294,809,000	320,122,880				
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	47 unit	100 persen	157,938,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	183,557,880
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	12 paket	100 persen	19,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	21,065,000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaraa gedung kantor dan bangunan lainnya	persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 paket	100 persen	117,721,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	115,500,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								3,382,611,187	3,952,351,962				
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								3,382,611,187	3,952,351,962				
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	1 dokumen	100 persen	72,422,720	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	100,244,232

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	200 orang	100 persen	59,319,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	77,933,626
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah wajib pajak daerah yang dikelola pendataannya secara berkala	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	610660 wajib pajak daerah	100 persen	121,016,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	140,192,085
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	4 dokumen	100 persen	109,073,680	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	104,228,168
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah kegiatan penilaian PBB-P2 serta BPHTB	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 kegiatan	100 persen	393,271,650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	505,385,210
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah jenis pajak yang ditetapkan atas ketetapan pajak daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	7 jenis	100 persen	53,572,410	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	69,421,561
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	6 layanan	100 persen	631,508,467	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	730,340,014
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	4 dokumen	100 persen	64,278,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	105,223,272
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Persen	610660 wajib pajak daerah	100 persen	1,752,059,240	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	1,918,909,894
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 tahun	100 persen	26,698,650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	52,451,685

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Bone  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 kegiatan	100 persen	70,008,650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	82,151,740
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 kegiatan	100 persen	29,382,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	100 Persen	65,870,475
TOTAL													13,550,478,212				15,434,830,434	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan dirumuskannya Rencana kerja Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang melalui upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh Stakeholder terkait dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan dalam bagi seluruh pemangku kepentingan , sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2022.